

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

1.1.1 Organisasi Nirlaba

1.1.1.1 Definisi Organisasi Nirlaba

Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu (Sule dan Saefullah, 2005:4). Menurut Nazila dan Fahlevi (2019), Organisasi adalah suatu entitas sosial yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan batasan relatif diketahui, berfungsi secara terus menerus untuk mencapai tujuan bersama (Nazila dan Fahlevi, 2019). Organisasi didirikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Berdasarkan tujuannya organisasi dibedakan atas organisasi berorientasi laba dan organisasi berorientasi non laba atau organisasi nirlaba (Aldiansyah dan Lambey, 2017).

Organisasi berorientasi laba ialah sekumpulan orang yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit dalam kegiatan bisnisnya, sehingga mereka berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan melakukan kerja sama di dalam sebuah organisasi. Sedangkan organisasi berorientasi non laba atau organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi berorientasi laba dimana tujuan dari organisasi berorientasi laba ialah mencari laba sebesar-besarnya sementara organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang bertujuan tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang mencari laba (Nazila dan Fahlevi, 2019).

Menurut Dev Anand (2018), organisasi nirlaba adalah suatu lembaga atau organisasi yang tujuannya tidak mencari keuntungan serta dananya diperoleh dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan. Organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, organisasi pelayanan kesehatan, organisasi pendidikan, dan organisasi jasa sukarelawan. Widodo dan Kustiawan (2001) dalam Widiyanto dan Ardiyanto (2019) Organisasi nirlaba

menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia.

1.1.1.2 Karakteristik Organisasi Nirlaba

Karakteristik organisasi nirlaba atau entitas nirlaba tentunya berbeda dengan organisasi berorientasi laba. Berikut ini ialah karakteristik entitas nirlaba berdasarkan PSAK No.45 efektif tahun 2018 paragraf 1 :

- a. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan
- b. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut
- c. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

1.1.2 Klinik

Klinik merupakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dan dokter gigi). Berdasarkan pelayanannya, klinik dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Klinik pratama ialah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar yang dilayani oleh dokter umum dan dipimpin oleh seorang dokter umum. Berdasarkan perijinannya klinik ini dapat dimiliki oleh badan usaha ataupun perorangan.
- b. Klinik utama ialah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialis (pelayanan medik dasar dan spesialisik). Spesialistik berarti

mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, atau jenis penyakit tertentu. Klinik ini dipimpin oleh seorang dokter spesialis atau dokter spesialis gigi. Berdasarkan perijinannya klinik ini hanya dapat dimiliki oleh badan usaha berupa CV atau PT.

Adapun perbedaan antara klinik pratama dan klinik utama yaitu sebagai berikut:

- a. Pelayanan medis pada klinik pratama hanya pelayanan medis dasar, sementara pada klinik utama mencakup pelayanan medis dasar dan spesialistik;
- b. Pimpinan klinik pratama adalah seorang dokter atau dokter gigi, sedangkan pada klinik utama pimpinannya adalah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis;
- c. Layanan di dalam klinik pratama mencakup layanan rawat inap, namun hanya untuk klinik pratama yang berbentuk badan usaha. Sedangkan semua klinik utama dapat memberikan layanan rawat inap;
- d. Tenaga medis dalam klinik pratama ialah minimal dua orang dokter atau dokter gigi, sedangkan klinik pratama diperlukan satu orang spesialis untuk masing-masing jenis pelayanan.

Berdasarkan Permenkes RI No.9 tahun 2014, bagi klinik yang menyelenggarakan rawat inap maka klinik tersebut harus menyediakan berbagai fasilitas yang mencakup:

- a. Ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan memiliki minimal 5 tempat tidur dan maksimal 10 tempat tidur;
- b. Lama inap maksimal 5 hari;
- c. Tenaga medis dan keperawatan sesuai jumlah dan kualifikasi
- d. Dapur gizi
- e. Pelayanan laboratorium klinik pratama

Permenkes RI No. 9 tahun 2019 menjelaskan bahwa klinik dalam menjalankan operasionalnya klinik memiliki kewajiban meliputi :

- a. Memberikan pelayanan aman, bermutu, mengutamakan kepentingan pasien, sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
- b. Memberikan pelayanan gawat darurat pada pasien sesuai kemampuan tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mengutamakan kepentingan pasien;
- c. Memperoleh persetujuan tindakan medis;
- d. Menyelenggarakan rekam medis;
- e. Melaksanakan sistem rujukan;
- f. Menolak keinginan pasien yang tidak sesuai dengan standar profesi, etika, dan peraturan perundang-undangan;
- g. Menghormati hak pasien;
- h. Melaksanakan kendalin mutu dan kendali biaya;
- i. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan.

1.1.3 Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK No.1 efektif tahun 2018, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. PSAK No.1 efektif tahun 2018 menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Martani,dkk, 2016). Secara laporan keuangan yang lengkap harus meliputi semua komponen berdasarkan PSAK No.1 efektif tahun 2018 yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, Laporan Arus Kas selama periode, Catatan Atas Laporan Keuangan, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya, dan Laporan Posisi Keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya.

Laporan keuangan memaparkan kinerja entitas dalam suatu periode. Informasi terkait kinerja diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya

ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang hakikatnya adalah informasi kuantitatif, sehingga agar informasi tersebut berguna bagi pemakai informasi tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif (Martani,dkk, 2016). Karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna berdasarkan PSAK No.1 efektif tahun 2018 yaitu agar informasi keuangan menjadi berguna, informasi tersebut harus relevan dan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.

a. Dapat dipahami

Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai laporan keuangan agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Martani,dkk, 2016).

b. Relevan

Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut memengaruhi keputusan ekonomi pemakai laporan keuangan sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu (Martani,dkk, 2016).

c. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (Martani,dkk, 2016).

d. Dapat dibandingkan

Untuk tujuan perbandingan antarperiode dan dengan entitas lain, maka pengukuran dan penyajian dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten antarperiode dan konsisten dengan entitas lain. (Martani,dkk, 2016).

Laporan keuangan tidak hanya dibuat oleh organisasi berorientasi laba, namun organisasi organisasi berorientasi non laba atau organisasi nirlaba juga memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui kegiatan organisasi dalam satu

periode dan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan, penyaluran dana, dan kegiatan sosial lainnya kepada pihak yang membutuhkan yaitu pihak internal dan eksternal organisasi nirlaba. Atufah,dkk (2018) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan aktivitasnya organisasi nirlaba menggunakan sumber daya yang berasal dari masyarakat, sehingga dari pertanggungjawaban laporan keuangannya harus bersifat terbuka dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Menurut Rudianto (2009:10) tujuan penyajian laporan keuangan oleh sebuah entitas adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu entitas
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi entitas yang timbul dalam aktivitas operasional demi memperoleh laba
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan untuk mengestimasi potensi entitas dalam menghasilkan laba di masa depan.

Adapun para pemakai laporan keuangan yang menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Menurut Sofyan (20017:7) para pemakai laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pemilik perusahaan.

Bagi para pemilik perusahaan, laporan keuangan dimaksudkan untuk :

- a. Menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen;
- b. Mengetahui hasil dividen yang akan diterima;
- c. Menilai posisi keuangan perusahaan dan pertumbuhannya;
- d. Mengetahui nilai saham dan laba per lembar saham;
- e. Sebagai dasar untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa datang;
- f. Sebagai dasar untuk mempertimbangkan menambah atau mengurangi investasi.

2. Manajemen Perusahaan.

Bagi manajemen perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk :

- a. Alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik;

- b. Mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, divisi, bagian, atau segmen tertentu;
 - c. Mengukur tingkat efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, divisi, bagian, atau segmen tertentu;
 - d. Menilai hasil kerja individu yang diberi tugas dan tanggung jawab;
 - e. Memenuhi ketentuan dalam UU, Peraturan, AD(Anggota Dasar), Pasar Modal, dan lembaga regulator lainnya.
3. Investor.
- Bagi investor, laporan keuangan digunakan untuk :
- a. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan;
 - b. Menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan;
 - c. Menilai kemungkinan menanamkan divestasi (menarik investasi) dari perusahaan;
 - d. Menjadi dasar memprediksi kondisi perusahaan di masa datang.
4. Kreditur atau Banker
- Bagi kreditur atau banker, laporan keuangan digunakan untuk :
- a. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang;
 - b. Menilai kualitas jaminan kredit/investasi untuk menopang kredit yang akan diperiksa;
 - c. Melihat dan memprediksi prospek keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan;
 - d. Menilai kemampuan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas perusahaan sebagai dasar dalam pertimbangan keputusan kredit.
5. Pemerintah dan Regulator.
- Bagi pemerintah dan regulator laporan keuangan digunakan untuk :
- a. Menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar;
 - b. Sebagai dasar dalam penetapan-penetapan kebijaksanaan baru;
 - c. Menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan lain;
 - d. Menilai kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ditetapkan;

- e. Bagi lembaga pemerintahan lainnya bisa menjadi bahan penyusunan data dan statistik
6. Analisis, Akademis, Pusat Data Bisnis
- Bagi para analis, akademis, dan juga lembaga-lembaga pengumpulan data bisnis seperti PDBI, *Moody's*, *Brynstreet*, *Standard and Poor*, Perfindo, laporan keuangan ini penting sebagai bahan atau sumber informasi yang bermanfaat bagi analisis, ilmu pengetahuan, dan komoditi informasi.

1.1.4 Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi merupakan pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sangat penting agar laporan keuangan yang dibuat dapat lebih berguna, dapat dimengerti, dan dapat diperbandingkan. Di Indonesia berlaku empat standar akuntansi yang sering disebut dengan 4 Pilar Standar Akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Keuangan disusun oleh lembaga Ikatan Akuntan Indonesia yang selalu mengacu pada teori-teori yang berlaku dan memberikan tafsiran dan penalaran yang mendalam dalam pembuatan laporan keuangan untuk memperoleh informasi yang akurat (Nurlaela dan Mutmainah, 2014).

Secara garis besar terdapat empat hal pokok yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan unsur laporan keuangan
- b. Definisi elemen dan pos laporan keuangan
- c. Pengukuran unsur laporan keuangan
- d. Pengungkapan atau penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan.

1.1.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba. Dengan adanya pedoman pelaporan, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.

Berikut ini adalah beberapa istilah yang digunakan dalam PSAK No.45 efektif tahun 2018 paragraf 05 sebagai berikut:

- a. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi entitas nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomik lain yang berasal dari sumber daya tersebut.
- b. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
- c. Sumber daya terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, pembatasan tersebut bersifat permanen atau temporer.
- d. Sumber daya tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

1.1.5.1 Tujuan Laporan Keuangan Entitas Nirlaba

Dalam PSAK No.45 efektif tahun 2018, tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Secara rinci,

tujuan laporan keuangan, termasuk Catatan Atas Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai:

- a. Jumlah dan sifat aset, liabilitas, dan aset neto entitas nirlaba;
- b. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat aset neto;
- c. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya;
- d. Cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya;
- e. Usaha jasa entitas nirlaba

1.1.5.2 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba

Laporan Keuangan Entitas Nirlaba meliputi Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode laporan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas untuk suatu periode pelaporan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (PSAK No.45 efektif tahun 2018; paragraf 09).

1.1.5.2.1 Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam Laporan Posisi Keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam laporan keuangan lain dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain untuk menilai kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan serta menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas

Laporan posisi keuangan, termasuk Catatan Atas Laporan Keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas

keuangan dan hubungan antara aset dan liabilitas. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relative homogen.

Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo;
 - b. Mengelompokkan aset kedalam kelompok lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam kelompok jangka pendek dan jangka panjang;
 - c. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh tempo liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, dalam catatan atas laporan keuangan.
- b. Klasifikasi Aset Neto Terikat atau Tidak Terikat

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.1.5.2.2 Laporan Aktivitas

Tujuan utama Laporan Aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto; hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan bagaimana sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode.

Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian:

- a. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh pemberi

sumber daya dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat

- b. Sumber daya disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, bergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumber daya terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumber daya tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi
- c. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain (atau liabilitas) sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi
- d. Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam kelompok aset neto tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam Laporan Aktivitas
- e. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK atau SAK ETAP
- f. Laporan aktivitas menyajikan jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi incidental atau peristiwa lain yang berada di luar pengendalian entitas nirlaba dan manajemen

Laporan aktivitas atau Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.

1.1.5.2.3 Laporan Arus Kas

Tujuan utama Laporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK No. 2 tentang Laporan Arus Kas atau SAK ETAP Bab 7 dengan tambahan berikut ini:

- a. Aktivitas Pendanaan:
 - (i) Penerimaan kas dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang
 - (ii) Penerimaan kas dari pemberi sumber daya dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi
 - (iii) Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya dalam jangka panjang
- b. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas, misalnya sumbangan berupa bangunan atau aset investasi.

1.1.6 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mengatur terkait pencatatan akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan SAK umum dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi pada laporan keuangan. SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang :

- (a) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- (b) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

2.1.6.1. Pengakuan unsur laporan keuangan

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan
- (b) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

2.1.6.2. Pengukuran unsur laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut menurut SAK ETAP adalah:

(a) Biaya Historis

Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

(b) Nilai Wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar.

2.1.6.3. Dasar Akrua

Entitas dalam menyusun laporan keuangan harus menggunakan dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.

2.1.6.4. Pengakuan dalam Laporan Keuangan

Pengakuan dalam laporan keuangan menurut SAK ETAP Paragraf 2.34-2.38 :

- 1) Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.
- 2) Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan

kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

- 3) Penghasilan diakui karena akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
- 4) Beban diakui karena akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
- 5) Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

2.1.6.5. Penyajian Laporan Keuangan

- a. Penyajian wajar. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 *Konsep dan Prinsip Pervasif*.
- b. Kepatuhan terhadap SAK ETAP. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.
- c. Kelangsungan usaha. Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen

bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut.

- d. Frekuensi pelaporan. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan:
 - (a) Fakta tersebut;
 - (b) Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek; dan
 - (c) Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan.
- e. Penyajian yang konsisten. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:
 - (a) Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam Bab 9 *Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan*; atau
 - (b) SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian.
- f. Informasi Komparatif. Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.
- g. Materialitas dan Agregasi. Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan

dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.

- h. Laporan Keuangan Lengkap. Laporan keuangan entitas meliputi:
 - (a) Neraca;
 - (b) Laporan laba rugi;
 - (c) Laporan perubahan ekuitas;
 - (d) Laporan arus kas; dan
 - (e) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.
- i. Identifikasi laporan keuangan. Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan:
 - (a) Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir;
 - (b) Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;
 - (c) Mata uang pelaporan, seperti didefinisikan dalam bab *25 mata uang pelaporan*;
 - (d) Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

Entitas harus mengungkapkan hal berikut ini dalam catatan atas laporan keuangan:

- (a) Domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantornya yang terdaftar;
- (b) Penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait penerapan PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba terus menerus mengalami perkembangan. Berikut ini adalah ringkasan tinjauan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini, antara lain:

Tabel 2.1
Daftar Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti,dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	“Analisis Penerapan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba berdasarkan PSAK No.45 pada Masjid di Kota Banda.” Siti Rahma Nazila dan Heru Fahlevi (2019).	Analisis Deskriptif dan Distribusi Frekuensi.	Seluruh masjid yang diteliti sudah membuat laporan keuangan secara rutin dan mencatat setiap transaksi keuangan dilengkapi dengan bukti-bukti, namun belum ada masjid yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan format pencatatan laporan keuangan PSAK No.45.
2.	“Analisis Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK No.45 Tentang	Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif.	Laporan keuangan Masjid Agung Nurul Huda belum menggunakan format laporan keuangan yang sesuai dengan

	<p>Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus di Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa Besar).”</p> <p>Diah Intan Syahfitri, SE., M.Acc dan Viki Ulandari, S.Ak (2019).</p>		<p>PSAK No.45.</p> <p>Laporan keuangan Masjid Nurul Huda hanya menyajikan posisi kas minggu lalu, penerimaan dan pengeluaran minggu ini, dan jumlah kas akhir. Berbeda dengan PSAK No.45 yang menyajikan empat laporan keuangan yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.</p>
3.	<p>“Analisis Penerapan PSAK No.45 pada Organisasi Nirlaba (Studi pada Lembaga Masjid At-Taqwa, Sidoarjo).”</p> <p>Erika Putri dan Eni Wuryani (2019).</p>	<p>Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif.</p>	<p>Lembaga belum mengetahui pencatatan pelaporan keuangan menurut PSAK No.45 mengenai entitas nirlaba. Para pengurus masjid mengatakan bahwa laporan keuangan mereka selalu menggunakan metode pembukuan tinggal (<i>Single Entry Methode</i>). Laporan Keuangan yang dibuat oleh Masjid At-Taqwa belum sesuai dengan PSAK No.45, hanya membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas.</p>
4.	<p>“Evaluasi Penerapan PSAK No.45 pada Yayasan Kitabisa,</p>	<p>Metode Penelitian Kualitatif</p>	<p>Secara keseluruhan, laporan keuangan organisasi nirlaba yang disajikan oleh Yayasan,</p>

	<p>ICW & Rumah Zakat.”</p> <p>Dwi Anggoro Widiyanto dan Ferdiantoro Ardiyanto (2019).</p>	<p>Deskriptif.</p>	<p>Asosiasi maupun lembaga di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada PSAK No.45 yaitu terdiri Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Laporan Aktivitas (berdasarkan pada ketiga laporan keuangan sampel <i>audited</i> tahun 2017). Namun demikian, masih ditemukan beberapa detail minor yang belum diungkapkan sehingga harus disesuaikan untuk pelaporan periode berikutnya.</p> <p>Sementara itu, untuk <i>item</i> Laporan keuangan Yayasan Kitabisa, Asosisasi ICW dan Rumah Zakat tahun 2017 <i>audited</i> adalah sesuai dengan standar PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Namun, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian yang cukup material, terutama terkait penyajian Aset Tetap dan Klasifikasi Aset Neto dalam Laporan Posisi Keuangan serta penyajian Perubahan Aset Neto dalam Laporan Aktivitas.</p>
--	---	--------------------	---

			Serta pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Yayasan Kitabisa, Asosiasi ICW dan Lembaga Rumah Zakat tahun 2017 <i>audited</i> masih belum menyajikan informasi secara detail atas pos dan akun yang disajikan dalam Laporan Keuangan.
5.	<p>“Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45 pada Panti Asuhan Al-Huda Ridwaniyah.”</p> <p>Jumaiyah dan Wahidullah (2019).</p>	<p>Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif.</p>	<p>Panti Asuhan Al-Huda Ridwaniyah telah menyusun Laporan Aktivitas dan Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode , sementara Laporan Arus Kaas dan Catatan Atas Laporan Keuangan belum disusun. Jadi, Panti Asuhan Al-Huda Ridwaniyah belum menerapkan PSAK No.45.</p>
6.	<p>“Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Berdasarkan PSAK 45.”</p> <p>Dev Anand (2018).</p>	<p>Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif.</p>	<p>Pertama, dalam pengelolaan keuangan Yayasan Hajjar Roestilah belum menerapkan pengelolaan keuangan yang standar yaitu PSAK No.45. Kedua, pelaporan yang dilakukan sebatas jumlah penerimaan dan pengeluarannya serta nilai saldo dari masing-masing jenis penerimaan dan beban serta</p>

			saldo keuangan berupa kas dan bank. Ketiga, Yayasan Hajjah Roestilah sudah memenuhi peraturan perundang-undangan untuk membuat laporan keuangan sesuai standar PSAK 45.
7.	<p>“Penerapan PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah”</p> <p>Intan Devi Atufah, Norita Citra Yuliarti, dan Dania Puspitasari (2018).</p>	Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif.	Penyusunan laporan keuangan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah belum sesuai dengan PSAK No.45 karena laporan keuangan disajikan sangat sederhana, yakni pencatatan pemasukan dan pengeluaran dengan menggunakan metode <i>accrual basic</i> .
8.	<p>“Analsis Penerapan PSAK No.45”</p> <p>Endra Julianto, Nurita Affan, dan Ferry Diyanti (2017).</p>	Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif.	Lapora keuangan yang disusun oleh masing-masing Badan Pelaksana yang terdiri dari kegiatan masjid, pendidikan dan bisnis yang diarsir oleh Yayasan Al-Ma’ruf Samarinda hanya berupa laporan pendapatan dan pengeluaran kas dan tidak dilakukan konsolidasi. Laporan keuangan Yayasan juga tidak melakukan penilaian aset dan

			perhitungan penyusunan aktiva tetap, sehingga nilai aktiva tetap tidak menunjukkan nilai sebenarnya. Jadi, laporan keuangan Yayasan Al-Ma'ruf tidak sesuai dengan PSAK No.45.
9.	<p>“Analisis Penerapan PSAK No.45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba dalam Mencapai Transparansi dan Akuntabilitas Kantor Sinode GMIM”</p> <p>Ignasius Rian Gultom (2015).</p>	<p>Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif.</p>	<p>Kantor Sinode GMIM belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.45, sebab Kantor Sinode GMIM hanya menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran belanja dan pendapatan yang disusun berdasarkan tata gereja GMIM.</p>
10.	<p>“Implementasi PSAK No.45 dalam Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Berstatus Badan Layanan Umum.”</p> <p>Siti Nurlaela dan Mutmainah (2014).</p>	<p>Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif.</p>	<p>BBKPM Surakarta telah menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK No.45 dan ketentuan yang berlaku bagi Badan Layanan Umum yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dapat diterapkan penuh pada Layanan Umum khususnya BBKPM Surakarta.</p>

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

